

RINGKASAN

Indra Gunawan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Barcode QR Dalam
247410101064 Pembelian Bbm Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Utara

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

Penyaluran BBM bersubsidi sering mengalami berbagai penyimpangan, seperti penimbunan dan penyalahgunaan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi pembelian BBM bersubsidi dengan penggunaan Barcode QR Code melalui aplikasi MyPertamina. Pelayanan BBM Bersubsidi di SPBU hanya dilakukan apabila telah dilakukan scant QR Code dan sama dengan Nomor Polisi Kendaraan. Namun fakta dilapangan masih terjadi pembelian BBM bersubsidi tanpa adanya scant QR Code dan adanya penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan yang akan diisi BBM bersubsidi di SPBU Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara, menganalisis kendala dalam pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara masih belum efektif karena masih adanya operator SPBU yang berani melakukan pengisian BBM bersubsidi tanpa adanya barcode QR dan tidak memeriksa kesesuaian barcode QR dengan kendaraan yang akan diisi BBM. Kendala pelaksanaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di SPBU Kabupaten Aceh Utara disebabkan karena kurangnya pengawasan lapangan yang dilakukan oleh manajemen SPBU Kabupaten Aceh Utara terhadap operator yang melakukan pengisian BBM bersubsidi menggunakan barcode QR. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kebijakan barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara tersebut dilakukan dengan menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melalui proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana di pengadilan negeri Lhoksukon

Disarankan agar petugas operator pengisian BBM bersubsidi melakukan scant barcode sesuai dengan ketentuan MyPertamina. Disarankan agar manajemen SPBU sering melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengisian BBM bersubsidi melalui scant barcode QR. Disarankan agar dibuat pengaturan yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan QR Code MyPertamina sebagai instrumen digital.

SUMMARY

Indra Gunawan The Effectiveness of the QR Barcode Policy Implementation in
247410101064 the Purchase of Subsidized Fuel in North Aceh Regency

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H and Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

The distribution of subsidized fuel often experiences various irregularities, such as hoarding and misuse. To address this issue, the government implemented a digital system for purchasing subsidized fuel using QR codes through the MyPertamina application. Subsidized fuel services at gas stations are only available if the QR code has been scanned and matches the vehicle registration number. However, in practice, subsidized fuel purchases still occur without a scanned QR code and the use of QR codes that do not match the vehicle being refueled at gas stations in North Aceh Regency.

The purpose of this thesis research is to analyze the effectiveness of the implementation of the QR barcode policy in purchasing subsidized fuel in North Aceh Regency, analyze the obstacles in implementing the QR barcode policy in purchasing subsidized fuel in North Aceh Regency and analyze law enforcement against the misuse of the QR barcode policy in purchasing subsidized fuel in North Aceh Regency.

The research method used is empirical juridical with a legal sociology approach. The data collection technique used in this thesis is field research. Data analysis in writing this thesis is carried out in 4 (four) stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The effectiveness of the implementation of the QR barcode policy in purchasing subsidized fuel in North Aceh Regency is still ineffective because there are still gas station operators who dare to fill subsidized fuel without a QR barcode and do not check the suitability of the QR barcode with the vehicle to be filled with fuel. The obstacle in implementing the QR barcode policy in purchasing subsidized fuel at gas stations in North Aceh Regency is caused by the lack of field supervision carried out by the management of North Aceh gas stations towards operators who fill subsidized fuel using QR barcodes. Law enforcement against the misuse of the QR barcode policy in purchasing subsidized fuel in North Aceh Regency is carried out by applying Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas through the process of arrest, investigation, prosecution, and criminal trials at the Lhoksukon district court.

It is recommended that subsidized fuel operators scan barcodes in accordance with MyPertamina regulations. Gas station management is also advised to frequently monitor the subsidized fuel filling process by scanning QR barcodes. It is recommended that regulations specifically address criminal sanctions for misuse of the MyPertamina QR Code as a digital instrument.